

PENETAPAN SIMBOL ARSITEKTUR PERUMAHAN MASYARAKAT RIAU (*Selembayung*) SEBAGAI STRATEGI DALAM MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU

Noor Efni Salam

Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Email: efnisalam@gmail.com

ABSTRAK-- Penelitian ini bertujuan untuk mengurai nilai-nilai filosofis *selembayung* sebagai wujud identitas budaya melayu Riau dan merunut makna dibalik ornamen (ukiran), warna dan berbagai atribut yang melekat padanya. Upaya itu dilakukan untuk menggali lebih dalam falsafah kehidupan masyarakat dan budaya Melayu Riau. Selain itu, penelitian ini juga melakukan penelusuran terhadap gerakan sosial yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dalam, merespons, menerima, melestarikan dan atau mempertahankan *selembayung* sebagai identitas budaya Melayu Riau, juga peran pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan atau menyusun peraturan daerah (perda) dalam menetapkan *selembayung* sebagai salah identitas budaya Melayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam menelaah *selembayung* sebagai strategi dalam melestarikan budaya melayu. Berdasarkan pendekatan ini peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap unit analisis yang diteliti sehingga didapatkan data akurat sesuai alur penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa *selembayung* sebagai arsitektur Melayu dalam penelitian ini diletakkan pada landasan konseptual identitas budaya, yakni identifikasi komunikasi dari sistem perilaku simbolis verbal dan nonverbal yang memiliki arti dan yang dibagikan di antara anggota kelompok yang memiliki rasa saling memiliki dan saling membagi tradisi, warisan, bahasa, dan norma-norma yang sama. Berdasarkan pemahaman itu, mempertahankan identitas budaya dan menguatkannya bisa melalui kesadaran dan pelestarian terhadap *selembayung* itu sendiri.

Keywords: *Arsitektur, selembayung, identitas, budaya, Melayu*

I. PENDAHULUAN

Selembayung yang disebut juga *Sulo Bayung* dan *Tanduk Buang* adalah hiasan yang terletak bersilang pada kedua ujung perabung bangunan. *Selembayung* dianggap mewakili ke-Melayu-an masyarakat Riau, karena memiliki beberapa makna yang bersumber pada filosofi dan nilai-nilai Melayu yang dipercaya dan dipedomani oleh masyarakat di Riau dalam bermasyarakat.

Di antara sekian banyak unsur budaya Melayu di Riau, *selembayung* menjadi salah satu yang terpenting yang justru belum mendapat dukungan sepenuhnya oleh masyarakat, terutama di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Riau (Efni, 2012 : 79). Argumentasi ini menunjukkan diperlukannya strategi, cara dan langkah-langkah untuk melestarikan keberadaannya (Efni, 2013 : 389). Selain untuk menguatkan posisi sebagai aspek vital budaya Melayu di Riau, pelestarian *selembayung* juga menjadi satu upaya pelestarian kebudayaan nasional pada umumnya. Hal ini penting karena kebudayaan daerah adalah bagian integral dari identitas kebudayaan nasional. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kebudayaan nasional, yang pertama perlu dilakukan adalah tindak pemertahanan kebudayaan daerah seperti *selembayung*. Dan penelitian ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung pemertahanan tersebut.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa langkah yang ditempuh masyarakat Riau sebagai upaya pemertahanan dan revitalisasi budaya antara lain melakukan berbagai kegiatan seperti festival budaya sedunia, menghidupkan tradisi/ritual keagamaan,

seminar ilmiah, event budaya dan lain-lain bekerja sama baik dengan pemerintah dan organisasi masyarakat lain. Namun penelitian-penelitian tersebut masih menyisakan problem terkait pro dan kontra ketika menetapkan unsur-unsur budaya sebagai ciri atau simbol yang diakui bersama, terutama, dalam konteks ini, adalah *selembayung* sebagai dasar arsitektur perumahan masyarakat Riau.

Mengacu pada pernyataan di atas, penelitian ini berusaha menggapai problem-problem yang muncul dan belum terselesaikan sebelumnya dengan mempertanyakan kembali makna dan relevansi unsur-unsur budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Riau. Lebih lanjut, masalah tersebut diformulasikan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana nilai-nilai filosofis yang terkandung (mendasari) *selembayung* sebagai wujud identitas budaya melayu Riau ? 2) Bagaimana makna yang terdapat dalam ornamen (ukiran), warna dan berbagai atribut yang melekat pada *selembayung* sehingga mencerminkan falsafah kehidupan masyarakat dan budaya Melayu Riau? 3) Bagaimana gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat seperti Lembaga Adat Melayu Riau, Dewan Kesenian, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau dan lain-lainnya dalam menolak, merespon, menerima, melestarikan dan atau mempertahankan *selembayung* sebagai identitas budaya Melayu Riau? 4) Bagaimana Pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan atau peraturan daerah (perda) dalam menetapkan *selembayung* sebagai identitas budaya Melayu.

Tujuan penelitian ini adalah menemukan jawaban atas masalah-masalah di atas, sementara manfaat yang diharapkan antara lain, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Riau dalam merumuskan kebijakan untuk menentukan desain perumahan sebagai penanda masyarakat Melayu baik pada tingkat nasional maupun internasional; semua informasi yang dihasilkan dalam penelitian ini berguna bagi masyarakat Riau dalam menggunakan *selembayung* sebagai salah satu artifak budaya yang meneguhkan identitas budaya melayu Riau; dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga budaya (Lembaga Adat Melayu Riau), Lembaga Adat Kabupaten maupun Kecamatan yang ada di Provinsi Riau dalam menyusun rancangan kerja atau melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap beberapa informan yang ditentukan secara purposive seperti : Tokoh Budaya/Tokoh Masyarakat, Birokrat, Akademisi, Pengurus Lembaga Budaya dan Pengamat Social. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap warga yang ditemui di Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Siak Sri Indrapura. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen baik pada instansi pemerintah maupun melalui lembaga-lembaga terkait, yang meliputi dokumen resmi, dokumen tertulis, karya ilmiah, dan lain sebagainya.

Sebagai penelitian kualitatif, maka teknis analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan yaitu: Pertama, pada tahap alur reduksi data, kegiatan yang dilakukan adalah berupa pengelompokan sesuai dengan topik permasalahan. Kedua, tahap penyajian data, merupakan kegiatan penyusunan data secara sistematis dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan polanya, selanjutnya disusun dalam bentuk bagan-bagan atau narasi-narasi sehingga membentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan penelitian. Ketiga, tahap terakhir dalam kegiatan analisis yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah melewati tahap pertama dan kedua, selanjutnya langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah mengambil kesimpulan.

III. HASIL DAN ANALISIS

A. Makna Selembayung di Kalangan Masyarakat Riau

Seperti bangunan tradisional lain pada umumnya, bangunan Melayu memiliki memiliki fungsi utama sebagai pusat berbagai aktivitas kebudayaan. Kehidupan budaya yang tercerminkan pada bangunan kemudian diistilahkan dengan Arsitektur Melayu. (Syafwandi, 1993 dalam Winandari, 2005:143). Sebagai salah satu cerminan budaya, arsitektur dapat dikatakan sebagai yang paling kuat dalam menopang etos dan

validitas sebuah budaya (O'Neil, 2006). Lebih jauh lagi, arsitektur memiliki komponen-komponen yang mendukung berjalannya peran dan fungsi tersebut. Komponen itu merupakan materi dasar dari kesatuan bangunan yang menyeluruh. Menurut Faisal dan Wihardyanto (2013:53) komponen-komponen tersebut merupakan faktor utama dalam melihat suatu arsitektur tradisional, yang mana terdiri dari: nama, bentuk bagian-bagian bangunan, tipologi, massa bangunan, struktur, susunan dan fungsi ruang, ornamen, serta cara pembuatan yang diwariskan secara turun temurun. Demikian pula dengan arsitektur Melayu yang memiliki begitu banyak komponen.

Di antara komponen-komponen itu, *selembayung* menjadi ornamen yang bermakna dan berfungsi vital. *Selembayung* yang disebut juga *Sulo Bayuang* dan *Tanduak Buang* adalah hiasan yang terletak bersilang pada kedua ujung perabung bangunan. Ukiran *selembayung* mengandung makna pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian lain adalah melambangkan bulan sabit yang memberikan penerangan ke seisi rumah. Sementara itu, sebagian lainnya menyebut ukiran *selembayung* melambangkan tanduk kerbau, hewan yang banyak membantu penduduk dalam mengolah pertaniannya (Depdikbud, 1987:122).

Makna lainnya kemudian muncul seiring dengan variasi yang ada dalam *selembayung* sebagai sebuah ornamen. Seperti sudah disimpulkan dalam banyak penelitian lain sebelumnya, terdapat beragam motif dasar ornamen arsitektur tradisional Melayu Riau yang bersumber dari alam, yaitu terdiri atas flora, fauna, dan benda-benda lainnya. Benda-benda tersebut kemudian diubah menjadi bentuk-bentuk tertentu, baik menurut bentuk asalnya seperti bunga-bunga, maupun dalam bentuk yang telah dimodifikasi sehingga tidak lagi memperlihatkan wujud asalnya, tetapi hanya menggunakan namanya saja seperti itik pulang petang, itik sekawan, semut beriring, dan lebah bergantung.

Dalam kaitannya dengan identitas kemelayuan masyarakat Riau, terutama dari segi arsitektur, *selembayung* mengandung beberapa makna, antara lain sebagai (1) Tajuk Bangunan, yang berarti *selembayung* membangkitkan seri dan cahaya bangunan; (2) Pekasih Bangunan, yang melambangkan keserasian dalam bangunan; (3) Pasak atap, lambang hidup yang tahu diri; (4) Tangga dewa, lambang tempat turun para dewa, mambang, *akuan*, *soko*, *keramat*, dan *sisi* yang membawa keselamatan bagi manusia; (5) *Rumah Beradat*, tanda bahwa bangunan itu adalah tempat kediaman orang berbangsa, balai atau tempat orang patut-patut; (6) Tuah rumah: yakni sebagai lambang bahwa bangunan itu mendatangkan tuah kepada pemiliknya; (7) Lambang keperkasaan dan wibawa; (8) Lambang kasih sayang (Faisal dan Wihardyanto, 2013:54). Terkait dengan pemahaman masyarakat Riau terhadap *selembayung* ditemui adanya pemahaman yang inklusif dan eksklusif terhadap *selembayung*

B. Pemahaman yang Inklusif dan Eksklusif terhadap Selembayung

Identitas budaya Melayu dalam *selembayung* melekat pada makna dan nilai-nilai filosofis yang dikandungnya. Oleh karena itu, sejauh mana makna dan nilai-nilai itu dipahami, diterima dan dihayati masyarakat Riau dalam kehidupan sehari-harinya menjadi penting. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis, dalam hal pemahaman, masyarakat terbagi antara yang paham dan yang tidak paham tentang makna-makna di balik *selembayung*. Warga yang paham pun terbelah antara yang hanya memahami apa itu *selembayung* dan yang memahami *selembayung* tidak sebatas definisi tetapi juga makna filosofis di dalamnya. Sebagian besar warga yang paham hanya mengerti *selembayung* secara definitif dan aktual, sebatas bentuk dan deskripsi tentang *selembayung*, yakni hiasan yang terbuat dari ukiran kayu yang membentuk silang dan biasanya berada di ujung-ujung bangunan di atas atap rumah atau atap bangunan sebagai simbol dari adat Melayu Riau. Hanya beberapa di antara mereka yang memahami nilai dan makna di balik *selembayung*, yang sebagian besar didapat dari informasi di luar jalur formal seperti sekolah atau penyuluhan.

Secara umum mereka memahami *selembayung* memiliki makna filosofis keberuntungan atau tuah dan keserasian. Nilai filosofis ini dipengaruhi oleh kepercayaan orang Melayu di masa yang lalu. Namun untuk nilai filosofi keberuntungan, barangkali tidak terlalu relevan dengan kehidupan orang Melayu pada masa ini. Sementara nilai keserasian bisa saja dipertahankan untuk merepresentasikan keindahan. Selain tiga nilai itu, menurut warga, *selembayung* juga merupakan lambang dari keperkasaan dan kewibawaan.

Selain memahami *selembayung*, warga juga memberikan pendapat mengenai bagaimana seharusnya symbol ini berfungsi dan digunakan. Sudah jamak diketahui oleh mereka bahwa *selembayung* merupakan identitas Melayu masyarakat Riau, di samping bangunan-bangunan ciri khas arsitektur Melayu lainnya. Bahkan, model ini cukup menonjol sebagai ciri khas Melayu sejajar dengan pakaian adat, kain songket, dan lain-lain. Sebagai identitas, menurut mereka *selembayung* masih sangat relevan untuk dilestarikan sebagai kekayaan budaya Melayu. Paling tidak *selembayung* harus diusahakan sebagai ciri khas di setiap bagian depan bangunan. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian, sebagian besar warga merasa perlu untuk

menyatukan symbol ini dengan arsitektur modern, sehingga bisa menjadi ciri dan diletakkan di bagian depan setiap bangunan atau dengan variasi-variasi yang lain. Modifikasi yang dilakukan tidak akan mengubah maknanya sebagai identitas Melayu selama makna tersebut dipahami dalam pikiran masyarakat yang membangun dan mendiami bangunan tersebut. bahkan lebih dari itu, beberapa informan juga membuka diri untuk menerima jenis-jenis bangunan budaya lainnya yang ada di Riau, yang juga mencerminkan budaya Melayu seperti misalnya rumah “Lontiok” dan “Limas.”

Pandangan inklusif masyarakat umum tentang bagaimana *selembayung* digunakan dan dimaknai di atas justru bertolak belakang dengan pandangan salah seorang pakar budaya dari Universitas Riau. Pandangannya terhadap penetapan model tersebut sebagai simbol arsitektural budaya Melayu sangat eksklusif. Menurutnya, *selembayung* tidak bisa hanya digunakan sebagai perhiasan bangunan publik seperti ruko dan kantor pemerintahan, apalagi hanya sebagai daya tarik wisatawan. Pada kenyataannya, *selembayung* yang diletakkan di bangunan modern hanya menjadi tempelan yang tidak diketahui makna filosofinya. Beliau berpendapat apabila semua bangunan dipaksakan menggunakan *selembayung*, ada beberapa bangunan yang terkesan tidak cocok dan melenceng dari nilai filosofisnya. Salah satu contoh bangunan di Riau yang gagal mengaplikasikannya adalah gedung Dinas Pariwisata. Hal tersebut nampak pada peletakkannya yang salah satu sisinya menyentuh ke tanah, ketika seharusnya *selembayung* diletakkan pada posisi yang mulia (di atas) tanpa boleh menyentuh tanah.

Ia mempertanyakan segala hal secara rinci baik dari segi teknis hingga siapa saja yang berhak menggunakan *selembayung*. Kalaupun harus dipasang, ada baiknya digunakan di kantor pemerintahan saja, bukan di sembarang bangunan karena akan membuat fungsinya sebagai identitas Melayu hilang. Lebih lanjut menurutnya, identitas kemelayuan dalam aspek arsitektur tidak semata-mata ditentukan oleh *selembayung*. Di sisi yang berbeda, model tersebut sebenarnya juga sangat bertolak belakang dengan ilmu desain kontemporer yang jika digabungkan begitu saja justru bisa mengkerdikan kreatifitas arsitek. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *selembayung* harus dipertahankan kemurniannya karena jika dicampur acak begitu saja dengan bangunan yang lain (modern) akan menghancurkan kedua belah pihak mulai dari segi filosofis sampai aspek praktisnya.

Pandangan yang demikian juga tercermin dalam beberapa tulisan ilmiah para ahli seperti kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan Wahyu Hidayat tahun 2011. Hasil dari penelitian yang dilakukan menyimpulkan, mayoritas desain bangunan kontemporer yang menggunakan langgam arsitektur Melayu, menggunakannya secara tidak tepat menurut filosofinya dan lebih memprioritaskan aspek identitas daripada aspek ekologi dalam merespon kondisi lingkungan. Dalam kasus ini, Wahyu Hidayat lebih mengutamakan aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan daripada makna-makna kultural yang mungkin bisa dicitrakan sebuah bangunan.

Pandangan eksklusif ini berlaku bukan hanya dalam rangka purifikasi budaya, tetapi juga menutup kemungkinan aspek lain bercampur dengan *selembayung* dan secara berlawanan juga kemungkinan symbol ini diterapkan pada model-model yang berbeda. Yang menarik kemudian adalah pandangan yang tampaknya absolut dan mengurung ini dilontarkan oleh pakar dan ahli yang berkesempatan untuk merumuskan strategi kebudayaan untuk disebarkan ke masyarakat di sekitarnya dan menjaga eksistensinya. Oleh karena itu, dapat diduga, problem terkait *selembayung* dan identitas Melayu muncul ke permukaan justru karena gagasan eksklusif ahli-ahli budaya tersebut.

Sebaliknya, pandangan masyarakat awam justru berkebalikan dan lebih relatif dalam memberlakukan *selembayung*. Salah seorang warga ketika diwawancarai mengatakan:

“Saya kira kalau dirancang dengan baik, dan secara sadar dipadukan antara bangunan dengan arsitektur modern dengan selembayung, maka selembayung ini akan bisa menjadi bagian yang bukan hanya bersifat tempelan, tetapi lebih menyatu, dan bisa tampak apik. Sebagai contoh, walaupun mungkin bukan dalam bentuk selembayung, dinding ruang olah raga SMP/SMA Darma Yudha yang menghadap ke jalan adalah contoh yang cukup bagus untuk ditiru, bila selembayung ingin dimasukkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan.”

Dalam keragaman pemahaman terhadap makna dan simbol-simbol yang menyertai *selembayung*, penerimaan masyarakat terhadap berbagai modifikasi terhadap model ini ternyata lebih besar. Hal itu bisa juga menandakan bahwa symbol ini masih menjadi bagian dari aktivitas kehidupan sehari-hari mereka, masih menjadi bagian yang distingtif dari identitas mereka sebagai orang Melayu secara general. Jadi, meskipun terjadi banyak perubahan dan terdapat banyak keragaman, identitas harus dan akan selalu terjaga. Hanya saja, ciri yang menandai identitas itu yang bisa berubah (Zarzar, 2010: 63). Bagi masyarakat Melayu di Riau, jika *selembayung* tidak diterapkan seperti aslinya yang merujuk pada bangunan-bangunan terdahulu,

selembayung jenis yang baru secara bersamaan akan muncul, yang dikolaborasikan dengan bangunan-bangunan modern yang lain dan disandingkan dengan bangunan Melayu yang lain pula.

C. *Gerakan Sosial Sebagai Respons dan Pemertahanan Selembayung*

Gerakan-gerakan sosial telah diselenggarakan dalam rangka membangkitkan dan merevitalisasi *selembayung* sebagai salah satu ciri identitas Melayu masyarakat Riau oleh berbagai elemen masyarakat. Yang dimaksud dengan elemen masyarakat di sini adalah lembaga-lembaga baik dari pemerintah ataupun bukan dan kelompok masyarakat seperti Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Dewan Kesenian Riau, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau, *Tennas Effendy Foundations (TEF)*, Forum Komunikasi Masyarakat Melayu Riau (FKPMR), dan lain-lainnya. Kegiatan dan gerakan itu dilakukan kurang lebih selama sepuluh tahun (sekitar tahun 2001-2011), dimana semangat kebangkitan kebudayaan Melayu di hampir semua daerah di Riau, berupaya mengembangkan dan memperbincangkannya, baik dari berbagai komunitas atau kelompok mencoba mengkongkritkan semangat itu dalam gerakan-gerakan yang sejalan dengan pemahaman dan cara pandang masing-masing. Di antara lembaga-lembaga itu, beberapa yang sangat signifikan perannya seperti Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang melakukan penerbitan buku-buku bekerja sama dengan Pariwisata. Walaupun lima tahun belakangan ini gerakan social tersebut agak “mengendur”

Lembaga-lembaga tersebut memiliki program khusus dalam rangka melestarikan unsur-unsur budaya Melayu salah satunya dari aspek arsitektur (*selembayung*). Akan tetapi sejauh ini, program tersebut belum berjalan maksimal. sebagian besar masyarakat pun tidak mengetahui program-program yang mereka canangkan. Kelemahan dalam gerakan baik yang merespons, menerima, melestarikan dan atau mempertahankan *selembayung* sebagai identitas budaya Melayu Riau bukan hanya terlihat dari ketiadaannya program konkret tetapi juga pada tataran ketidaktahuan terhadap filosofi *selembayung*. Kalaupun nilai-nilai filosofis tersebut sudah dipahami, kelemahan lain muncul seiring dengan perdebatan karena pemahaman yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa warga di Pekanbaru, kegiatan dan gerakan sosial lembaga-lembaga tersebut tidak terinfokan dengan baik. Mereka mengetahui *selembayung* melalui pengetahuan yang didapatkan turun-temurun dari keluarga atau informasi melalui media. Meskipun secara garis besar tidak mengetahui program dari gerakan sosial tersebut, seorang warga mengakui, di antara berbagai pendapat tentang *selembayung* yang berbeda tersebut, yang menurutnya paling sesuai dikembangkan adalah gagasan dikembangkan oleh H. Tenas Effendy dalam institusinya.

Pendapat informan ini semakin meneguhkan bahwa di tengah maraknya berbagai gerakan sosial mengenai *selembayung*, masalah dan perdebatan tentang nilai-nilai filosofis dibaliknya, dan bagaimana nilai itu harus diterapkan, terus mengemuka. Gerakan itu muncul seiring dan bahkan berpotensi semakin memperuncing perbedaan itu.

Problem lain yang dikemukakan informan terhadap gerakan-gerakan sosial tentang *selembayung* adalah terbatasnya lingkup gerakan. Menurut mereka, yang dilegitimasi oleh pemerintah untuk melaksanakan gerakan tersebut hanya lembaga-lembaga tertentu yang formal. Sementara banyak lembaga lain atau sekadar komunitas informal belum dirangkul. Seorang warga memberi usul, agar pemerintah daerah mendorong komunitas-komunitas dalam masyarakat, misal komunitas otomotif untuk ikut berperan serta memajukan pariwisata di Riau, termasuk mempromosikan *selembayung*. Informan yang lain mengusulkan bahwa Pemerintah Daerah harus bekerja dengan pihak Perguruan Tinggi, dan Asosiasi Profesi Sipil/Arsitek, untuk merancang variasi pencantuman /pemasangan *selembayung* pada bangunan, serta ukuran-ukuran yang proporsional. Setelah itu, maka perlu dilakukan sosialisasi, baik lewat seminar-seminar, media massa, pendidikan di sekolah, menjadikan hal tersebut persyaratan IMB, dan lain-lain. Hubungan dan kerjasama dengan asosiasi profesi sipil dan arsitek mungkin tidak terpikirkan sebelumnya walau untuk kasus *selembayung* itu menjadi sangat penting.

Komunitas pertama yang diusulkan informan tentu saja jauh dari jangkauan pemerintah karena mereka tidak terhubung secara langsung dalam program-program kultural, terutama *selembayung* dan tidak sedikit dari mereka yang diposisikan selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Berbeda halnya dengan Asosiasi Profesi Sipil/Arsitek yang memang memiliki relasi langsung dengan tingkat urgensi yang tinggi untuk melakukan kerja sama. Bahkan, kerja sama dengan arsitek memungkinkan terciptanya keselarasan antara *selembayung* sebagai identitas Melayu dan bagaimana itu ditempatkan di tengah-tengah bangunan modern tanpa menghilangkan nilai filosofisnya dengan tetap mempertimbangkan nilai dasar kepantasan dan standar arsitektur modern.

Pengandaian dan gagasan di atas mungkin diwujudkan mengingat sebagian besar warga, meskipun dalam wawancara individual bersama masing-masing dari mereka memilih tidak menggunakan *selembayung* pada bangunan pribadi, setuju dan menerima kemungkinan modifikasi dan perbedaan penggunaannya di bangunan-bangunan publik. Seperti yang diungkap salah satu informan bahwa:

“...perbedaan adalah wajar, namun Pemerintah Daerah harus dapat memfasilitasi berbagai perbedaan itu agar tercapai suatu kesepakatan, mungkin dengan mengadopsi beberapa variasi serta mendefinisikan dengan baik, baik bentuk, maupun ornamen dan warnanya, serta variasi cara pemasangan/pencantumannya pada bangunan. Variasi yang disepakati di samping dapat menampung perbedaan, juga mencegah terjadinya homogenisasi yang bisa berdampak membosankan. Memuaskan semua pihak adalah hal yang tidak mungkin, oleh karenanya Pemerintah Daerah termasuk DPRD harus dapat membuat keputusan. Sebab bila tidak, maka bukan hanya satu atau dua simbol yang akan hilang, tapi semuanya.”

Sebagian informan bahkan meyakini, berbagai bentuk dan nilai yang berbeda-beda di balik *selembayung* itu tidak ada, dalam artian tidak perlu dipersoalkan. Mereka mengatakan bahwa “Secara umum *selembayung* itu sama. Bila ada perbedaan di masing-masing daerah, saya rasa itu sah-sah saja dan menjadi bagian dari kekayaan.”

Melihat kutipan di atas, perbedaan dan perdebatan tentang *selembayung* nampaknya justru terjadi di kalangan tertentu, elit dan pengambil kebijakan sendiri. Tentu saja yang dikatakan informan tidak mewakili seluruh pemahaman yang dimiliki masyarakat Riau, tetapi paling tidak, melalui penjarangan pendapat dan wawancara, diketahui berbagai gagasan yang muncul langsung dari mereka sehingga faktual dan akurat untuk dijadikan pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depan.

D. Kebijakan dan Peraturan Daerah (perda) dalam Menetapkan *Selembayung*

Pelestarian *selembayung* sebagai salah satu identitas Melayu masyarakat Riau dipayungi terutama oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 sebagai payung hukum visi Riau 2020. Setelah itu, berbagai daerah menyusun sendiri peraturan ataupun visi mereka dengan maksud yang sama. Seperti visi Kota Pekanbaru yang mengupayakan “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa tahun 2021”. Demikian pula dengan Kabupaten Siak Sri Inderapura yang ingin menjadikan wilayahnya “Sebagai pusat budaya Melayu di Riau yang didukung oleh agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera pada Tahun 2025”.

Dalam sebuah wawancara dengan peneliti, Pulsia Mitra, Kepala Bidang Pelestarian Adat Dinas Kebudayaan Propinsi Riau mengatakan bahwa pada Agustus nanti (2017), akan segera diresmikan Peraturan Gubernur yang menetapkan bahwa *selembayung* sebagai ciri khas Riau. Tidak hanya *selembayung*, peraturan itu juga terkait dengan warisan budaya lainnya. Ia menyebutkan dalam regulasi tersebut terdapat penjelasan tentang bentuk asli *selembayung* sebagai verifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang selama ini mengemuka.

Jadi, yang dilakukan pemerintahan propinsi melalui pengesahan peraturan baru di atas merupakan upaya untuk menyinkronkan berbagai peraturan yang ada di bawahnya, yang digawangi oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota, demi pencapaian visi kebudayaan Melayu dengan berbagai aspek pembangunan lainnya di tahun 2020. Sebab selama ini, di sebelas kabupaten/kota yang ada di Riau saat itu, ketidaksatuan pandangan dalam target waktu pencapaian visi kebudayaan Melayu masih kerap mengemuka. Kenyataan itu merupakan perpecahan pandangan yang mendasar antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Provinsi Riau yang memang perlu diselesaikan sebelum melangkah lebih jauh. Bagaimanapun, seperti yang diungkap oleh Yusmar Yusuf, peraturan daerah tentang identitas kemelayuan di Riau merupakan pelopor yang menjadi rujukan dari perda-perda sejenis di propinsi lain sehingga selain dianggap legitimatif, peraturan tersebut juga menjadi kebanggaan dan bukti pertama kesadaran budaya Pemerintahan Riau.

Beberapa informan ahli bahkan memberikan rincian bagaimana sebuah perda harus disusun dan juga alur penggunaannya. Menurut mereka, karena masyarakat Riau itu sangat beragam, harus ada penekanan dari pemerintah supaya ada keseragaman dalam menumbuhkan kebanggaan budaya. Undang-undang tersebut, secara garis besar mengupayakan setiap perusahaan/instansi yang ingin membangun wajib memasang *selembayung* dengan ketentuan yang diberlakukan untuk melestarikan budaya melayu dan sebagai perwujudan visi Riau 2020. Peraturan itu juga nantinya dimasukkan ke dalam persyaratan IMB dengan berbagai strategi agar masyarakat bisa memenuhinya.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pihak yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan rencana peraturan propinsi tersebut. Menariknya, pandangan-pandangan yang berseberangan itu muncul dari pihak-pihak yang fokus pada budaya Melayu, seperti LAMR. Berdasarkan data yang diperoleh ketika diwawancara-i, LAMR tidak pernah menuntut adanya kejelasan Perda mengenai *selembayung* sebagai sebuah identitas. Bagi mereka, *selembayung* sudah menjadi fenomena masyarakat yang terlihat dan dominan meskipun masih rancu dan tidak ada kejelasan. Saat membicarakan perbedaan dan kerancuan tersebut, Lembaga Adat Melayu lebih fokus kepada hal-hal yang belum ada atau belum teruskan di tengah masyarakat, seperti misalnya hak-hak masyarakat adat dan muatan lokal.

Pendapat yang sama juga dikatakan mantan Ketua DPRD Pekanbaru, Chaidir, ketika membicarakan proses pembangunan gedung DPRD yang bernuansa Melayu. Ia tidak ingat persis, apakah peraturan tentang *selembayung* itu Peraturan Wali Kota (Perwako) atau Peraturan daerah (Perda), beliau mengatakan bahwa :

“...kalau pembicaraan khusus tentang selembayung tidak pernah ada di DPRD. Itu sudah dianggap sebagai ‘given’, memang sudah begitu. Pihak DPRD hanya memberi kerangka acuan tentang apa yang dibutuhkan gedung DPRD dan menegaskan pada arsitek pembangun bahwa bangunan harus ada nuansa dan juga mengandung nilai-nilai Melayu. Ketika mereka mempresentasikan bagaimana bentuknya, DPRD setuju dengan apa yang disampaikan karena itu sesuai kerangka. Yang diperdebatkan adalah kebutuhan space-nya. Untuk bagian atap, karena sudah menjadi identitas Melayu, jadi DPRD semua setuju dan tidak membantah.”

Kemudian ia menegaskan lagi, bahwa peraturan daerah tentang *selembayung* tidak perlu diangkat ke propinsi, sebab peraturan itu berkisar pada hal-hal yang sifatnya teknis, artinya, jika tetap menjadi peraturan daerah, tapi setiap daerah bisa memiliki ciri khasnya. Adalah tidak mungkin melaksanakan penyeragaman di seluruh daerah Riau karena justru akan mengurangi kekayaan budaya Riau sendiri. Meskipun demikian, pemerintah tetap secara umum memperkenalkan *selembayung* sebagai identitas Riau. Jika pada kenyataannya ada modifikasi sesuai dengan kekayaan yang ada di daerah masing-masing, pemerintah bisa menyertakannya sebagai artifak budaya yang lain di ranah arsitektur Melayu Riau. *Selembayung* hanya salah satu ciri identitas bangunan melayu yang tidak tunggal dan tidak perlu ditunggal.

Tampaknya, gagasan dari LAMR dan beberapa ahli yang mempertanyakan kembali kebijakan formal mengatur *selembayung* dalam perda bisa menjadi jawaban berbagai perdebatan yang selama ini bermunculan terkait dengan symbol itu. Permasalahan mengenai *selembayung* tidak bisa diselesaikan semata-mata pada penyeragaman dan penerimaan masyarakat yang dilegitimasi formal oleh pemerintah, melainkan mengembalikannya pada masyarakat pengguna untuk memposisikan *selembayung* dalam aktivitas nyata sehari-hari mereka, sesuai dengan kebutuhan mental dan praktis mereka. Gagasan ini bisa menjadi langkah mula dalam merumuskan cara yang paling efektif untuk melestarikan *selembayung* dan meningkatkan relevansinya di kehidupan masyarakat Melayu Riau kontemporer.

Salah seorang informan mengusulkan kepada pemerintah agar mengadakan sayembara dengan hadiah atau penghargaan tertentu kepada pemilik gedung atau rumah yang melestarikan *selembayung* terbaik. Sayembara itu berlaku untuk semua jenis bangunan khususnya yang berada di jalan protokol, baik milik pemerintah, bangunan institusi pendidikan maupun swasta, dan lain-lain. Usulan ini sangat baik dalam rangka pelestarian simbol ini, walaupun tetap, itu tidak berarti bahwa semua bangunan harus memakai *selembayung*.

Lebih jauh lagi, cara menerima *selembayung* sebagai identitas arsitektural Melayu satu-satunya juga perlu ditinjau kembali. Pada kenyataannya, *selembayung* memang bukan satu-satunya identitas arsitektural Melayu, dan problem identitas selalu harus dirunut ke ranah individual masyarakat penggunanya. Seperti yang dikatakan Lustig dan Koster, identitas budaya adalah rasa kepemilikan seseorang terhadap budaya atau kelompok etnik tertentu sehingga identitas harus dimiliki dan menjadi bagian dari hidup masyarakatnya (Samovar, 2010:184). Oleh karena itu, jika pembicaraan *selembayung* hanya dilakukan pada level elite, pembicaraan itu tidak mengarah pada pokok dan pusat permasalahan, yakni rasa kepemilikan masyarakat terhadap identitasnya. Hubungan identitas dengan individu juga terikat emosi seperti yang dikatakan Ting-Toomey dan Chung yang melihat identitas budaya sebagai signifikasi emosi yang kita tambahkan pada rasa kepemilikan kita atau afiliasi dengan budaya yang lebih besar. Jadi, identitas merupakan produk dari keanggotaan seseorang dalam kelompok (Samovar, 2010:184). Oleh karena itu, upaya yang dilakukan harus dimulai dari bawah, langsung dari masyarakat, bukan selalu dari atas ke bawah, dari pemerintah ke masyarakat (*top-down*).

Upaya peningkatan pemahaman tentang *selembayung* dari bawah, dari level individu, berarti juga dari aspek pendidikan mental dan moral kepada generasi muda. Hal sederhana seperti membawa siswa studi

banding ke LAMR untuk mempelajari berbagai kearifan lokal. misalnya *selembayung*, dan filosofi rumah tradisional orang Melayu dahulu kala lainnya merupakan langkah paling konkret dan ideal untuk segera dilakukan. Aspek lain yang diusulkan oleh informan antara lain diadakannya lomba fotografi tematik, misalnya tema *selembayung* atau lomba replika *selembayung*. Jadi, pelestariannya tidak selamanya berarti penggunaan *selembayung* secara total di seluruh bangunan di Riau, tetapi juga pengetahuan akannya, kecintaan dan bagaimana *selembayung* direproduksi dalam berbagai rupa. Apalagi hal itu didukung oleh perkembangan media yang pesat, yang bisa mempercepat proses-proses tersebut. Hal ini sudah dilakukan oleh tim di Dinas Pendidikan yakni menggunakan *facebook*, *instagram*, dan *youtube* untuk mempromosikan dan mengelola unsur-unsur budaya Melayu.

Dengan pandangan yang demikian, meskipun peraturan dibuat, peraturan itu tidak dimaksudkan untuk homogenisasi. Ruang variasi tetap terjaga untuk *selembayung*, dan tentu saja ruang untuk unsur arsitektur budaya Melayu yang lain. Budaya menjadi tidak terkotak-kotak terpisah antara yang lebih legitimatif dan tidak diakui. Untuk membuat masyarakat mengakui *selembayung* sebagai identitas, tidak hanya memerlukan sebuah peraturan yang baku. Di sisi yang lain, tidak digunakannya *selembayung* di bangunan-bangunan, tidak membuat symbol ini lantas hilang sebagai identitas Melayu. Identitas budaya itu melekat pada masyarakat pengusungnya. Unsur-unsur dari identitas itu juga bisa berubah seiring masa. Demikian pula dengan *selembayung* dan yang lainnya. Perubahan dan keberagaman itu justru menjadi kekayaan budaya dan daya tarik Riau.

IV. SIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Penetapan simbol arsitektur perumahan masyarakat Riau (*selembayung*) sebagai strategi dalam melestarikan budaya Melayu mendapat berbagai tanggapan. Tanggapan yang terbuka justru berasal dari masyarakat, sementara yang lebih tertutup dan eksklusif muncul dari kalangan elit. Dari perbedaan pandangan tersebut tampak bahwa *selembayung* sebagai ciri identitas Melayu justru bergerak lebih dinamis di kalangan masyarakat penggunaannya sehingga penyeragaman dan pengeksklusifan tidak akan berjalan efektif. Penyeragaman itu juga nantinya akan mengurangi kekayaan budaya Riau sendiri.

Upaya lain pelestarian terhadap *selembayung* adalah melalui gerakan sosial yang dilakukan berbagai elemen masyarakat. Gerakan sosial tersebut dirasakan belum maksimal pelaksanaannya dan tidak tepat sasaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap berbagai kalangan masyarakat, gerakan sosial baiknya diperluas lagi lingkup sarannya terutama ke kalangan generasi muda yang masih menempuh pendidikan.

Penggunaan perda juga dianggap tidak cukup efektif untuk melestarikan *selembayung* dan justru akan mereduksi kemungkinan perkembangan dan variasinya. Perda juga bisa mempersempit pandangan masyarakat tentang kekayaan budaya Melayu yang mereka miliki. Dari pada berpikir untuk menformalkan identitas budaya melalui peraturan, penanaman kecintaan terhadap identitas tersebut sejak dini lebih tepat dijadikan prioritas pemerintah ke depan.

Saran

Beberapa saran bisa diformulasikan kepada pihak-pihak yang terlibat upaya pelestarian *selembayung* ini antara lain:

Pertama, untuk pemerintah. penetapan peraturan daerah yang mengatur penggunaan *selembayung* perlu ditinjau kembali mengingat begitu banyak keterbatasan dan pandangan yang menganggap itu tidak cukup efektif sebagai bagian dari upaya pelestarian *selembayung*. Dari pada menciptakan berbagai peraturan, pemerintah bisa memulai upaya konkret dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat langsung dalam upaya pelestarian *selembayung*.

Kedua, untuk organisasi kemasyarakatan yang terlibat langsung dengan pelestarian budaya Melayu di Riau, mereka perlu bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan program-programnya, sekaligus secara bersamaan turun ke masyarakat dan menjaring pendapat serta problem yang mereka alami terkait permasalahan identitas budaya.

Ketiga, untuk akademisi, diperlukan adanya penelitian lanjutan untuk benar-benar memahami problem kultural mengenai identitas, terutama dalam hubungannya dengan unsur budaya Melayu arsitektural.

Kemempat, untuk masyarakat. Pemahaman terhadap *selembayung* perlu ditingkatkan lagi melalui forum dan aktivitas yang dilakukan mereka sehari-hari, juga bisa melalui media yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Depdikbud. 1987. *Arsitektur Tradisional Daerah Riau*. Jakarta: Indonesia
- [2] Efni, Noor, 2014. "Revitalisasi Budaya Melayu Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Komunikasi" dalam Prosiding Seminar Internasional Budaya dan Bahasa Melayu, Pusat Penelitian Budaya Universitas Riau.
- [3] _____, 2013. "Strategi Komunikasi dan Budaya Dalam Mempertahankan Identitas Masyarakat Melayu Riau," dalam Prosiding Seminar Nasional "Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa, FISIP-UR.
- [4] _____, 2012, "SIMBOL DAN IDENTITAS : Kajian Tentang Negosiasi dan Konsolidasi Terhadap Simbol Budaya Dalam Mempertahankan Identitas Masyarakat Riau" dalam Jurnal KOM DAN REALITAS SOSIAL, Volume 4, Nomor 4 April 2012, Universitas Bandar Lampung.
- [5] Faisal, Gun dan Dimas Wihardiyanto. 2013. "Selembayung sebagai Identitas Kota Pekanbaru. Kajian Langgam Arsitektur Melayu Riau" dalam *Indonesian Journal of Conservation* Vol.2 No.1 Juni 2013.
- [6] Hidayat, Wahyu. 2011. "Aplikasi Langgam Arsitektur Melayu sebagai Identitas Kawasan menuju Kota Berkelanjutan" dalam *Jurnal Local Wisdom* Volume III No.2 Juli 2011
- [7] Samovar, Larry, H, dkk. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya Edisi 7*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- [8] Winandari, M.I.R. (2005). *Arsitektur Melayu Adalah Arsitektur Tropis*, P roceedings of International Seminar Malay Architecture As Lingua Franca, Jakarta: Universitas Trisakti. 143-148.